

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin, dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Attard, David, et al. The IMLI Manual on International Maritime Law: Volume I – The Law of the Sea. Oxford: Oxford University Press, 2014.
- Berkes, Fikret, et al. Navigating Social-Ecological Systems: Building Resilience for Complexity and Change. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- Chua, Thia-Eng. The Dynamics of Integrated Coastal Management: Practical Applications in the Sustainable Coastal Development in East Asia. Quezon City: GEF/UNDP/IMO PEMSEA, 2006.
- Cicin-Sain, Bilitiana, dan Robert W. Knecht. Integrated Coastal and Ocean Management: Concepts and Practices. Washington, DC: Island Press, 1998.
- Djalal, Hasjim. Indonesia and the Law of the Sea. Jakarta: CSIS, 1995.
- Djalal, Hasyim. Pengamanan Wilayah Laut Indonesia dan Peran Strategis TNI AL. Jakarta: CSIS, 2015.
- Dwidjowijoto, Dwisuryo Indroyono Soesilo. Kembali ke Laut: Membangun Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Jakarta: Kemenko Bidang Kemaritiman, 2016.
- Furkon, Ukon Ahmad, dkk. Korporasi Nelayan: Mewujudkan Nelayan Berdaya dan Sejahtera Menuju Indonesia Emas 2045. Jakarta Selatan: Gagas Media, 2024.
- Hardjowijono, Prapto. Hukum Adat dan Hukum Laut Nusantara. Yogyakarta: UGM Press, 1997.
- Hunt, Alan. The Sociological Movement in Law. Philadelphia: Temple University Press, 1993.
- Johnston, Douglas M. The Theory and History of Ocean Boundary-Making. Montreal: McGill-Queen's University Press, 1988.
- Kelsen, Hans. Pure Theory of Law. Translated by Max Knight. Berkeley: University of California Press, 1967.

- Mahan, Alfred Thayer. *The Influence of Sea Power upon History, 1660–1783*. Boston: Little, Brown and Company, 1890.
- Magnis-Suseno, Franz. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia, 1995.
- Pauli, Gunter. *The Blue Economy: 10 Years – 100 Innovations – 100 Million Jobs*. Taos: Paradigm Publications, 2010.
- Satria, Arif. *Kebangkitan Maritim dan Tantangan Budaya Maritim Indonesia*. Bogor: IPB Press, 2018.
- Sen, Amartya. *Development as Freedom*. New York: Alfred A. Knopf, 1999.
- Tanaka, Yoshifumi. *The International Law of the Sea*. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.

Jurnal

- Andini, Orin Gusta. “Evaluasi Pembangunan Hukum di Kutai Kartanegara: Tantangan dan Peluang Berdasarkan Indeks Pembangunan Hukum.” *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 5, no. 2 (2025): 3261–3278.
- Anwar, Dewi Fortuna. “Koordinasi Lintas Sektor dalam Penegakan Hukum Laut.” *Jurnal Hukum Internasional* 17, no. 2 (2021): 233–245.
- Arif Satria, *Kebangkitan Maritim dan Tantangan Budaya Maritim Indonesia*, (Bogor: IPB Press, 2018), 45–48.
- Bambang Susantono, “Revitalisasi Agenda Poros Maritim Dunia dalam Kerangka Infrastruktur Maritim Nasional,” *Jurnal Infrastruktur dan Logistik Maritim*, Vol. 3, No. 2 (2018): 101–112.
- Biliana Cicin-Sain and Robert W. Knecht, *Integrated Coastal and Ocean Management: Concepts and Practices*, (Washington, DC: Island Press, 1998), 14–17.
- Choiruzzad, Shofwan Al Banna. “Indonesia’s Maritime Vision: Recovering a Geopolitical Identity.” *Asia Maritime Transparency Initiative*, CSIS, 2016.
- Huda, Syamsul. “Koordinasi Penegakan Hukum Laut di Indonesia: Tinjauan Terhadap Kelembagaan Bakamla.” *Jurnal Hukum Internasional* 18, no. 2 (2020): 117–135.
- Manguin, Pierre-Yves. “Sriwijaya and the Trade of Southeast Asia.” *Journal of Southeast Asian Studies* 31, no. 2 (2000).

Rahayu, Nenden Sri. “Keadilan Ekologis dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Berkelanjutan.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 1 (2021): 56–72.

Subagiyo, Henri. “Reklamasi Teluk Jakarta dan Keadilan Ekologis.” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 4, no. 2 (2019): 130–133.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982.

Disahkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1980.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4661.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5603.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 177/MPP/Kep/7/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut.

Internet

Antara News. “KKP Selamatkan BBL dari Penyelundupan Sebanyak 1,3 Juta Ekor.” 2023.

Badan Narkotika Nasional. *Laporan Tahunan Pengungkapan Kasus Narkotika Jalur Laut 2020–2023*. 2023.

Badan Pusat Statistik. *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV 2023*. Jakarta: BPS, 2023.

Badan Pusat Statistik. *Produk Domestik Bruto Indonesia Menurut Lapangan Usaha 2023*. Jakarta: BPS, 2023.

Finaka, Andrean W. “Indonesia Makin Banyak Dikunjungi Turis.” *Indonesiabaik.id*, 2023. Diakses 2 Januari 2025. <https://www.indonesiabaik.id/infografis/indonesia-makin-banyak-dikunjungi-turis>

Infopublik.id. “Selama 2020, KKP Gagalakan Penyelundupan Hampir Sejuta Benih Lobster.” 2021.

International Organization for Migration (IOM). *Forced Labour and Human Trafficking in the Indonesian Fishing Industry: Insights from Case Data 2013–2022*. Jakarta: IOM Indonesia, 2023.

KKP. *Profil Kelautan Indonesia 2022*. Jakarta: KKP, 2022.

KKP.go.id. “KKP Gagalakan Penyelundupan BBL Senilai Rp159,9 Miliar di Tahun 2021.” 2021.

- Kompas.com. “Kapal Pengawas KKP Ditabrak Kapal Vietnam di Natuna.” 28 April 2019.
- Kompas.id. “13 Perompak Kapal di Perairan Kalsel Dibekuk.” 16 Februari 2024.
- Kompas.id. “Laut Kepri Dijadikan Tempat Pembuangan Limbah oleh Kapal Asing.” 13 Oktober 2023.
- Kompas Regional. “TNI AL Tangkap 16 Nelayan Terkait Penambangan Pasir Ilegal di Labuan Bajo.” 11 Februari 2025.
- Menlhk.go.id. “Kapten Kapal Asing Pencemar Perairan Indonesia Divonis 7 Tahun Penjara dan Denda Rp5 Miliar.” Juli 2024.
- Mongabay Indonesia. “Intrusi Kapal Ikan Asing ke Perairan Indonesia Semakin Berani.” 19 Maret 2024.
- Mongabay Indonesia. “Laut Halmahera Timur Tercemar Parah Limbah Nikel.” 2 Januari 2024.
- Mongabay Indonesia. “Mengancam Lingkungan dan Berkonflik Sosial, Nelayan Kepri Tolak Penambangan Pasir Laut.” 10 Oktober 2024.
- UNECA. *Africa’s Blue Economy: A Policy Handbook*. Addis Ababa: UNECA, 2016.
- World Bank. *Indonesia Marine Economy Outlook*. Washington, DC: World Bank, 2022.